

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Sudan menjadi salah satu negara dengan konflik yang kompleks. Konflik ini didorong oleh beberapa faktor baik itu konflik antar etnis, perbedaan agama, maupun ketidakstabilan politik. Salah satu konflik utama dalam sejarah Sudan adalah konflik Darfur yang terjadi pada tahun 2003. Konflik ini melibatkan pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak yang memperjuangkan wilayah otonomi yang lebih besar bagi wilayah Darfur. Konflik ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa sekitar ratusan ribu meninggal dunia dan jutaan lainnya mengalami pengusiran. Selain itu, konflik besar lainnya terjadi pada tahun 1983 adanya perang sipil di Sudan Selatan (Center for Preventive Action, 2023). Perang ini berakhir pada tahun 2011 dan dimenangkan dengan kemerdekaan Sudan Selatan. Konflik yang terjadi puluhan tahun ini juga memakan banyak korban dan membuat Sudan sulit untuk berkembang. Selain itu menurunnya faktor ekonomi dan ketidakstabilan dalam negara membuat konflik ini memiliki dampak yang menghancurkan bagi Sudan. Perdamaian konflik ini berada dibawah kepemimpinan Umar Hasan al-Bashir. Sejak menjadi presiden Sudan dari 1993 hingga 2019 al-Bashir bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang dan pengusiran jutaan lainnya. Di sisi lain, ia juga berperan dalam perjanjian damai yang mengakhiri perang pada 2011 (Aljazeera, 2019).

Kepemimpinan Umar Hasan al-Bashir di Sudan terkenal dengan cara yang otoriter, dia tidak segan-segan untuk membuat kebijakan yang kontroversial, salah satunya adalah sikap anti Israel. Omar Hasan al-Bashir adalah pendukung teguh dari masalah Palestina dan seorang kritikus suara terhadap Israel. Dia menolak untuk mengakui Israel sebagai negara dan mendukung hak Palestina untuk kembali. Al-Bashir juga mendukung gerakan boikot, disinvestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel. Kebijakan al-Bashir terhadap Israel populer di kalangan masyarakat Sudan, tetapi juga mengisolasi Sudan dari komunitas internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan sanksi terhadap Sudan karena mendukung terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Isolasi ini memiliki

dampak negatif pada ekonomi Sudan, dan membuat sulit bagi Sudan untuk menarik investasi asing. Al-Bashir digulingkan dalam pemberontakan pada tahun 2019. Setelah al-Basyir digulingkan pada tahun 2019 Pemerintah Sudan yang baru telah mengatakan bahwa mereka terbuka untuk menormalkan hubungan dengan Israel, dan ini bisa menjadi langkah positif bagi Sudan. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan ekonomi Sudan dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain (Wicaksono, Sudan After Sanctions: Why Normalization Matters for Sudan, 2021).

Sejak dulu hubungan antara negara-negara Arab (UEA, Sudan, Maroko, Bahrain) dan Palestina terjalin dengan baik, negara-negara tersebut banyak melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Apalagi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, negara-negara ini menjadi garda depan dalam memberi dukungan baik itu berupa bantuan finansial maupun dalam bentuk tindakan. Salah satunya adalah dengan tidak menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Dukungan yang diberikan oleh negara-negara ini terhadap Palestina sebagai bentuk kewajiban moral dan politik Palestina adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Arab, dan banyak negara Arab merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk membantu bangsa Palestina dalam perjuangan mereka (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Selain itu, historis dan adanya kesamaan identitas dan keyakinan dengan Palestina sebagai negara Islam membuat banyak negara Arab memandang perjuangan Palestina dalam melawan Israel sebagai perjuangan mereka sendiri (Rahman, 2021). Oleh karena itu negara-negara Arab seperti UEA, Sudan, Maroko, dan Bahrain sangat anti untuk menjalin hubungan baik dengan Israel. Namun, terjadi pergeseran dinamika hubungan negara-negara Arab dengan Israel, pada tahun 2020 negara-negara Arab termasuk Sudan sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel (Ahmadi & Bumi, 2022). Sudan dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Sudan tidak memiliki kedutaan besar di Israel, dan begitu juga sebaliknya, Israel tidak memiliki perwakilan diplomatik resmi di Sudan. Kedua negara tidak pernah menjalin hubungan resmi sejak Sudan merdeka dari Inggris dan Mesir pada tahun 1956.

Dalam pandangan Bartson, normalisasi dapat digambarkan sebagai suatu proses individu yang sebelumnya terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak akur sehingga dapat mengurangi ketegangan atau gesekan, dan meningkatkan hubungan

yang lebih baik serta meningkatkan dampak hubungan yang konstruktif. Jika pada proses normalisasi ada hubungan buruk, terutama adanya ketegangan atau permusuhan diantara kedua belah pihak. Normalisasi dipandang sebagai proses untuk mengetahui ketegangan atau ancaman yang harus diciptakan agar dapat dilupakan. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperbaiki hubungan atau menyelesaikan sebagian atau seluruh konflik, seperti gencatan senjata, pembicaraan damai, atau hubungan diplomatik (Barston, 2013).

Sudan secara resmi menyetujui normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 23 Oktober 2020. Pernyataan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa Sudan siap menormalisasi hubungan dengan Israel (Times of Israel, 2021). Hal ini menjadikan Sudan sebagai negara Arab kelima yang menormalisasi hubungan dengan Israel, setelah Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Normalisasi yang dilakukan Sudan dinilai berdampak tidak langsung terhadap solidaritas negara-negara Muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pasalnya, kesepakatan normalisasi tersebut merupakan inisiatif langsung oleh pihak Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa ada permainan politik Amerika dalam bantuan tersebut yaitu dapat menggagalkan isu kemerdekaan Palestina yang telah diperjuangkan sejak lama.

Normalisasi diplomatik Sudan dan Israel ini mengejutkan banyak pihak. 2 bulan sebelum pengumuman normalisasi Sudan-Israel, tepatnya 26 Agustus 2020, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dengan tegas menegaskan tidak ada rencana untuk normalisasi diplomasi dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam kunjungannya ke Sudan. Pasalnya, Sudan selalu sangat aktif mendukung rakyat Palestina. Padahal, sejak 1958 Sudan telah memberlakukan Undang-Undang Boikot Israel selama puluhan tahun. Dalam Undang-undang pemboikotan Israel tersebut bagi siapa saja yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa penjara atau denda bagi orang-orang yang melanggar hukum, seperti berbisnis dengan Israel (Ulum, 2021). Selain itu, bukti besarnya dukungan Sudan terhadap Palestina juga ditunjukkan dengan aktifnya Sudan dalam menyerukan dan mengupayakan kemerdekaan Palestina dalam forum-forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Vokalnya Sudan dalam membela kemerdekaan Palestina ini membuat Sudan menjadi salahsatu target penyerangan oleh Israel. Pada 2012, Israel melakukan serangan udara pada pabrik

amunisi Sudan, sehingga menyebabkan kondisi domestik Sudan dalam situasi yang tidak baik. Namun serangan tersebut tetap tidak mampu membuat Sudan untuk berhenti untuk memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina (Syelvia, 2012).

Terbukanya kerjasama diplomasi antara Sudan dan Israel telah menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, terutama dari pihak yang mendukung Palestina. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berjanji tidak akan ada normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sampai pendudukan Palestina berakhir. OKI mengkritik normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Israel, yang melemahkan perjuangan Palestina dan solidaritas Arab dalam Inisiatif Perdamaian Arab 2002. Hal ini menunjukkan posisi Arab terhadap rakyat Palestina. Normalisasi ini juga mendorong Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang diwakili oleh 57 negara untuk merundingkan masalah tersebut (pers PBB). Aksi normalisasi ini menyebabkan Palestina kehilangan kepercayaan terhadap negara-negara Arab yang dikenal memiliki solidaritas besar dalam membela Palestina. Hal itu tertuang dalam penyelesaian sengketa, *Arab Peace Initiative* pada 2002. Dalam perjanjian itu, 22 anggota Liga Arab berjanji akan mempertahankan hubungan non-diplomatik dengan Israel hingga Israel memutuskan mundur.

Meskipun Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Sudan mengatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan mengubah posisi utamanya dalam menyelesaikan konflik dan akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Langkah normalisasi ini merupakan cara komprehensif untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Oleh karena itu, menarik untuk didiskusikan mengapa terjadi kesepakatan normalisasi antara Sudan dan Israel serta apa yang terjadi pada Palestina akibat dari kesepakatan normalisasi tersebut. Skripsi ini mencoba untuk membahas munculnya normalisasi hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel yang penting untuk diinisiasi karena berkaitan dengan prospek stabilitas keamanan di Timur Tengah dan global. Pada intinya kajian ini akan menguraikan apa yang melatar belakangi Sudan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan keuntungan apa yang didapat oleh Sudan setelahnya.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel. Maka rumusan pertanyaan

dalam penelitian ini adalah “Mengapa Sudan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020 pasca kudeta Umar Hasan Al-Basyir? ”

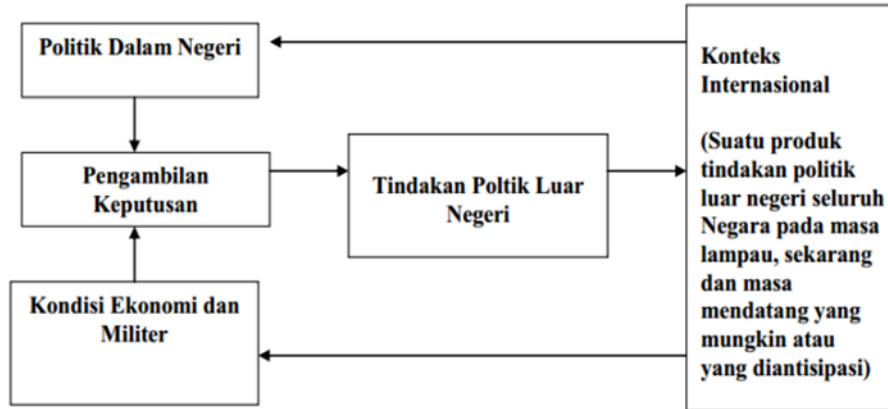
C. Kerangka Teori

Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah mekanisme yang digunakan pemerintah suatu negara dalam menjalin interaksi diplomatik dan hubungan mereka dengan negara lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan suatu negara serta membantu mendorong tujuan nasional. Hal ini dapat dipandang sebagai strategi mendasar untuk mencapai tujuan nasional sehingga dapat dicapai di luar batas perbatasan. Selanjutnya, strategi dasar tersebut diterapkan pada berbagai keputusan kebijakan luar negeri. Pelaku pengambil keputusan kebijakan luar negeri akan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Individu yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dari sebuah kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Hal ini sejalan dengan cara William D. Coplin menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Menurut William D. Coplin jika seseorang ingin menganalisa kebijakan luar negeri dari suatu negara tertentu, maka seseorang harus bertanya kepada para pemimpin negara tersebut mengenai bagaimana mereka membuat kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Menurut Coplin, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri di suatu negara, termasuk faktor budaya yang mempengaruhi perilaku politik masyarakatnya. Kedua adalah kondisi ekonomi dan militer suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional, dalam artian keadaan suatu negara atau pengaruh dari negara lain yang menjadi tujuan dan mendorong terbentuknya kebijakan luar negeri tersebut. Bagan dibawah ini merupakan pola mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara yang dipaparkan oleh Coplin dalam bukunya, yaitu:

Gambar.1 1 Proses Pengambilan Keputusan William D.Coplin



Sumber: William D.Couplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, (Bandung : CV. Sinar Baru, 1992).

Bagan di atas menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri suatu negara, khususnya politik dalam negeri negara tersebut. Kondisi politik dalam negeri suatu negara dapat dengan mudah dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Faktor lain yang juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri adalah kondisi ekonomi dan militer suatu negara. Terjadi perdebatan panjang mengenai mana yang lebih penting, ekonomi dan militer, yang menjadikan kedua faktor tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kemudian faktor ketiga yang juga disebutkan Coplin adalah konteks internasional. Konteks internasional tetap harus menjadi pertimbangan para aktor dan pengambil keputusan sebelum mengambil keputusan kebijakan luar negeri.

Jika diaplikasikan pada sudut pandang Sudan terkait pengambilan keputusan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, konteks internasional, Normalisasi hubungan Sudan dan Israel dipengaruhi oleh berbagai faktor internasional. Keterlibatan Amerika Serikat melalui perjanjian Abraham memainkan peran penting dalam upaya normalisasi antara Sudan dan Israel, termasuk membatalkan penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme, mencabut sanksi terkait, dan memberikan bantuan keuangan. Bagi Sudan, normalisasi dengan Israel dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap pendanaan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, dan untuk mendapatkan manfaat dari keahlian Israel di berbagai sektor. Selain itu, setelah normalisasi ini dilakukan Sudan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak (Knoph & Feltman, 2020).

D. Hipotesa

Sudan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020 karena ada dua faktor yaitu:

1. Adanya gelombang normalisasi di Timur Tengah
2. Penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme memberikan dampak bagi perekonomian Sudan.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menjelaskan alasan Sudan untuk sepakat dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pasca kudeta Umar Hasan Ahmad al-Basyir. Dalam menjawab pertanyaan dan memaparkan alasan tersebut didasarkan pada teori yang digunakan dan dapat dibuktikan dengan data yang valid.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan ini adalah dari tahun 2020-2022. Skripsi ini akan fokus untuk menganalisis normalisasi yang dilakukan oleh Sudan dan Israel di tahun 2020 saat normalisasi tersebut disepakati, pasca kudeta Umar Hasan Ahmad al-Basyir. Selanjutnya, untuk data-data yang diperlukan penulis menetapkan jangkauan penelitian diambil dari tahun 2019 hingga 2023. Namun tidak menutup kemungkinan data yang digunakan adalah data di luar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan dengan isu yang dibahas.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan data yang diperoleh dari karya tulis dan karya ilmiah. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan kajian kepada bagaimana sebuah fenomena sosial dieksplorasi sesuai dengan aspek-aspek yang berkaitan, yaitu aspek waktu, tempat, aktor, dan fenomena (Satori & Komariah, 2017). Metode kualitatif ini dapat digunakan dalam proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan semua data atau kondisi objek penelitian, yang dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kondisi yang ada, serta mencoba memberikan solusi atas permasalahan tersebut yang diharapkan dapat berguna untuk pengembangan. Metode kualitatif melalui proses penelitian yang melihat makna realitas dan fenomena sosial.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, khususnya penelusuran literatur dan survei literatur. Data sekunder biasanya adalah data yang telah diolah agar siap digunakan sehingga dapat mendukung penelitian. Data yang peneliti peroleh untuk skripsi ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, website, dan media massa yang berkaitan dengan judul dan topik penelitian ini: Analisis Normalisasi Sudan-Israel. Data yang dikumpulkan dari sumber tersebut diambil untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Peneliti kemudian membaca, mencari, dan menyempurnakan definisi, kata kunci, dan istilah yang membantu mereka memahami subjek dari pertanyaan yang diajukan yang akan disesuaikan dengan teori dan rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain proses membangun pemahaman terhadap isu-isu yang akan diteliti, mengkaji literature review sebagai acuan pembahasan isu penelitian, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, terpercaya, serta menulis laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Bab I yang berupa pendahuluan akan membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada Bab II akan membahas dinamika politik luar negeri Sudan, undang-undang yang diberlakukan Sudan dalam menjalankan tujuan politik luar negeri Sudan, dan lingkaran atau orientasi politik luar negeri Sudan dengan negara-negara Teluk, Rusia, China, dan hubungannya dengan Israel.

Pada Bab III akan membahas tentang normalisasi hubungan diplomati antara Sudan-Israel dan hubungan dunia Islam dengan Israel baik itu sebelum kemerdekaan Sudan maupun setelah Sudan meraih kemerdekaan pada tahun 1956. Bab ini akan menyoroti tentang bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sudan terkait dengan status hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih pada kepemimpinan Umar Hasan Ahmad Al-Basyir sampai pada passca kudetanya sehingga membuat Sudan menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada Bab IV akan membahas tentang faktor pendorong keputusan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Kemudian Bab V berisi pemhasan terakhir yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan pada pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya tentang faktor pendorong keputusan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.